

Kampanye Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

(Public Relations Campaign of the Environmental Sub-Department to Increase Public Participation in Waste Management in Jagakarsa District, South Jakarta)

Sulaiman ^{1*}, Poppie Indrianti Mantu ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ sulaimanlema258@gmail.com; ² poppie.indriantimantu@stiami.ac.id;

* Corresponding Author : Sulaiman

ARTICLE INFO

Kata kunci:

Penetapan Agenda;
Partisipasi Masyarakat;
Hubungan Masyarakat;
Pengelolaan Sampah;

Keywords :

Agenda Setting;
Community Participation;
Public Relations;
Waste Management;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2026
Jurnal Luaran (JUARA)
Mahasiswa Komunikasi

ABSTRACT

Studi ini menyoroti fenomena rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa, meskipun berbagai kampanye dan program sosialisasi telah dilakukan oleh Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan agenda, bentuk partisipasi masyarakat, dan evaluasi kampanye PR dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Jagakarsa. Metode kualitatif deskriptif diterapkan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan agenda oleh Humas mencakup agenda media, publik, dan kebijakan, yang telah diimplementasikan secara efektif. Partisipasi masyarakat terlihat selama tahap implementasi dan evaluasi tetapi masih terbatas dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun evaluasi dilakukan secara rutin, evaluasi tersebut kurang melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif dan transparan. Oleh karena itu, disarankan agar Divisi Hubungan Masyarakat memperkuat komunikasi dua arah, meningkatkan transparansi hasil evaluasi, dan mendorong kolaborasi berkelanjutan dengan masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kecamatan Jagakarsa.

Abstract

This study highlights the phenomenon of low active community participation in waste management in Jagakarsa District, despite various campaigns and socialization programs conducted by the Public Relations Division of the South Jakarta Environmental Agency. The research aims to analyze the implementation of agenda setting, forms of community participation, and the evaluation of PR campaigns in enhancing community involvement in waste management in Jagakarsa. A descriptive qualitative method was applied, with data collected through interviews, observations, documentation, and triangulation. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the agenda setting by Public Relations includes media, public, and policy agendas, which have been effectively implemented. Community participation is evident during the implementation and evaluation stages but remains limited in decision-making processes. Although evaluations are regularly conducted, they lack active and transparent community involvement. Therefore, it is recommended that the Public Relations Division strengthens two-way communication, increases transparency in evaluation outcomes, and fosters sustainable collaboration with the community to achieve more effective waste management in Jagakarsa District.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks komunikasi publik, peran Hubungan Masyarakat (Humas) menjadi sangat strategis, khususnya dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.

Berdasarkan teori agenda setting dari Dearing & Rogers, “pembentukan perhatian publik terhadap suatu isu, termasuk pengelolaan sampah, berlangsung melalui tiga tahap: agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan” (Safitri, et al., 2021). Pada tahap awal inilah Humas berperan penting untuk menempatkan pengelolaan sampah sebagai isu prioritas di tengah masyarakat. Selain itu, teori partisipasi dari Cohen & Uphoff menekankan “pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, yang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program” (Gufran, et al., 2022). Kedua kerangka teori ini saling melengkapi dalam memahami hubungan antara strategi komunikasi Humas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah merupakan faktor kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, karena tanpa keterlibatan aktif warga dalam memilah, mengolah, dan membuang sampah sesuai aturan, program pemerintah sulit mencapai hasil optimal. Masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai inisiatif, seperti mengurangi sampah dari sumbernya dengan prinsip *reduce, reuse, recycle (3R)*, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendukung program bank sampah dan komposting. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala berupa kurangnya informasi yang efektif, minimnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan rendahnya kesadaran akan dampak jangka panjang perilaku abai terhadap lingkungan. Permasalahan sampah menjadi semakin mendesak di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi, karena timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran udara akibat bau menyengat, pencemaran tanah akibat sampah anorganik yang sulit terurai, serta pencemaran air akibat rembesan limbah. Selain itu, sampah yang membusuk dapat menjadi sarang penyakit dan tempat berkembang biak berbagai vektor penyakit, seperti lalat dan tikus, yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar di wilayah Jakarta, khususnya di Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan data Sistem Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 69,9 juta ton, yang didominasi oleh sisa makanan sebesar 41,60% dan sampah plastik sebesar 18,71%, dengan rumah tangga sebagai penyumbang terbesar yakni sekitar 44,37%. Data tersebut menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat krusial untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, di mana keberhasilannya tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan perilaku melalui kampanye komunikasi yang efektif. Di Kecamatan Jagakarsa, permasalahan ini semakin kompleks akibat kepadatan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi yang mendorong bertambahnya volume sampah, sehingga pengelolaannya menjadi semakin sulit dilakukan secara efektif.

Berdasarkan data Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan, pada tahun 2023 Kecamatan Jagakarsa tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar di wilayah tersebut dengan total volume mencapai 265,35 ton. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah di wilayah ini memerlukan perhatian lebih, mengingat tingginya volume sampah yang harus dikelola. Selain Jagakarsa, kecamatan lain seperti Pasar Minggu dan Kebayoran Lama juga memiliki kontribusi besar terhadap timbunan sampah di wilayah Jakarta Selatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perubahan paradigma masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi hal yang mutlak diperlukan. Pengelolaan sampah tidak lagi sebatas pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), melainkan harus berfokus pada pemilahan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang akan memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam siklus produksi, sedangkan sisanya, yang tidak dapat diproses lebih lanjut, menjadi residu yang dibuang ke TPA. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, yang memandang sampah bukan sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Sebagai bagian dari implementasi strategi ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan komunitas lokal, salah satunya adalah melalui

sosialisasi pengolahan sampah dan pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan atau RW. Bank sampah menjadi sarana edukasi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana warga dapat menabung sampah terpilah dan menukarkannya dengan insentif ekonomi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyadari pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah dan mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, seperti pemilahan sampah plastik bernilai ekonomis untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Implementasi ekonomi sirkular diwujudkan melalui program berbasis prinsip *reduce, reuse, dan recycle (3R)* yang bertujuan meminimalkan jumlah limbah, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam kerangka ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai masalah semata, tetapi sebagai potensi ekonomi yang dapat diolah menjadi produk bernilai. Salah satu bentuk program edukasi tersebut adalah pelatihan dan workshop pengolahan sampah organik, seperti budidaya maggot (larva lalat BSF) yang digalakkan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan bersama komunitas Laskar Urban Jagakarsa sebagai solusi pengelolaan sampah organik rumah tangga. Selain itu, program inovatif seperti “Bayar Internet dengan Sampah” menjadi contoh bagaimana sampah yang dipilah dan disetorkan masyarakat dapat ditukar dengan manfaat langsung, sehingga mendorong perubahan perilaku sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi sirkular di tingkat lokal.

Kegiatan ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran ekologis bahwa sampah organik memiliki nilai guna tinggi jika dikelola dengan tepat. Produk hasil olahan, seperti pupuk cair, dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik urban farming dan penghijauan kota, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ini turut memperkuat komitmen kolektif terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya. Efektivitas program pengelolaan sampah yang diinisiasi pemerintah, baik melalui pelatihan, workshop, maupun sosialisasi bank sampah, tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Salah satu indikator konkret keberhasilan ini adalah bertambahnya jumlah anggota bank sampah aktif di berbagai kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, yang tidak hanya mencerminkan antusiasme masyarakat dalam memilah dan menyeter sampah, tetapi juga menjadi bukti keberhasilan komunikasi publik dalam membentuk kesadaran kolektif.

Berdasarkan data dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan tahun 2025, jumlah anggota bank sampah di Kecamatan Jagakarsa mengalami peningkatan dari 1.161 anggota pada tahun 2023 menjadi 1.227 anggota pada tahun 2024, dan mencapai 1.842 anggota pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program edukatif dan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah dan komunitas lokal, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Keberhasilan pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa tidak lepas dari peran Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup sebagai motor penggerak kampanye publik yang bertugas menyebarkan informasi, membangun citra positif program, dan menumbuhkan semangat partisipatif melalui berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun tatap muka. Kampanye yang efektif mampu membentuk kesadaran kolektif bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Peran strategis Humas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong perubahan perilaku, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program. Sebaliknya, jika peran Humas tidak berjalan optimal, berbagai program berisiko gagal akibat rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu dampak negatif luas, seperti pencemaran, penurunan estetika kota, menurunnya kualitas hidup, serta meningkatnya beban pemerintah dalam pengelolaan limbah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengoptimalkan komunikasi publik untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Juniartini, 2020) yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui konsep 5R,

sedangkan penelitian (Gunawan, 2022) lebih fokus pada peran Humas dalam meningkatkan partisipasi untuk pengurangan sampah non-organik di Kota Tangerang. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana proses humas berkontribusi dalam membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, khususnya dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Jagakarsa yang memiliki tingkat timbulan sampah tertinggi di Jakarta Selatan.

Dengan demikian, terdapat *research gap* yang menjadi landasan bagi penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan teori *agenda setting* dan teori partisipasi masyarakat untuk menganalisis strategi kampanye Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengelola sampah di Kecamatan Jagakarsa. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan studi komunikasi publik lingkungan, serta rekomendasi praktis untuk optimalisasi kampanye pengelolaan sampah berbasis kolaborasi pemerintah–masyarakat di tingkat kecamatan.

Model Konseptual

Permasalahan sampah di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah menjadi isu mendesak yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, mulai dari pencemaran tanah, air, hingga udara. Berdasarkan data SIPSN KLHK, timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 69,9 juta ton, didominasi sisa makanan 41,60% dan plastik 18,71%, dengan rumah tangga sebagai penyumbang terbesar 44,37%. Di Jagakarsa sendiri, volume sampah pada 2023 tercatat sebagai yang tertinggi di Kota Jakarta Selatan, yakni 265,35 ton, dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya memerlukan solusi teknis, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan sosial, edukatif, dan partisipatif untuk mengurangi dampak negatif serta menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan publik.

Dalam konteks ini, peran Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan sangat penting, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik, perancang strategi kampanye, dan penggerak agar isu pengelolaan sampah menjadi prioritas masyarakat. Melalui pemanfaatan media komunikasi konvensional seperti spanduk, poster, dan penyuluhan, serta media digital seperti media sosial dan situs web resmi, Humas menyampaikan pesan lingkungan yang edukatif dan persuasif untuk membangun kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan serta keberlanjutan lingkungan. Lebih dari itu, Humas berperan menciptakan komunikasi dua arah yang partisipatif, mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam program pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan di rumah, pengelolaan bank sampah, hingga keterlibatan dalam kampanye lingkungan, sehingga dapat memicu perubahan perilaku yang lebih kuat dan berkelanjutan terhadap kebersihan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan teori *agenda setting* dari Dearing & Rogers sebagai kerangka teoritis utama untuk memahami bagaimana isu pengelolaan sampah dapat ditetapkan sebagai agenda prioritas publik. Teori ini menjelaskan bahwa “proses *agenda setting* berlangsung dalam tiga tahap, yaitu agenda media (media menentukan isu), agenda publik (isu menjadi perhatian masyarakat), dan agenda kebijakan (isu menjadi perhatian pembuat kebijakan)” (Safitri, et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran strategis dalam tahap agenda media, di mana mereka secara aktif menyusun dan menyebarkan pesan kampanye yang bertujuan membentuk persepsi dan prioritas masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori partisipasi dari Cohen & Uphoff sebagai kerangka untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Cohen & Uphoff dalam (Gufran, et al., 2022) “membagi partisipasi ke dalam empat dimensi utama: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menikmati hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.” Teori ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam program pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, keempat dimensi tersebut menjadi instrumen analisis dalam

menilai efektivitas kampanye Humas serta kontribusi nyata masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kecamatan Jagakarsa.

Dengan menggabungkan dua pendekatan teori tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas dapat mempengaruhi pembentukan agenda pengelolaan sampah, dan bagaimana partisipasi masyarakat menjadi faktor dalam menyukseskan upaya-upaya tersebut. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di Kecamatan Jagakarsa.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Saktisyahputra, et al., 2024), “penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang tidak kaku, karena mendasarkan sifatnya yang menyesuaikan kondisi riil yang ada (*naturalistic conditions*) sehingga peneliti memungkinkan untuk bisa memberikan analisis dalam banyak perseptif.” Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena sosial yang diteliti, dilakukan pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020). Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumen formal yang relevan, dengan fokus pada proses dan hubungan antarbagian yang diteliti, bukan sekadar hasil akhir. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif untuk memahami interaksi sosial melalui wawancara dan observasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menentukan nilai variabel bebas tanpa membandingkan atau mengaitkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2020), menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku yang diamati. Pemilihan jenis penelitian deskriptif ini sesuai dengan isu yang diangkat, yaitu peran Humas pada Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun partisipasi masyarakat pada program pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang valid melalui sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi dan keterlibatan langsung dalam isu penelitian, serta observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati fenomena dan mengumpulkan dokumen terkait. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan triangulasi untuk memperkuat validitas informasi dengan menggabungkan berbagai teknik dan perspektif. Informan penelitian terdiri dari pejabat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Selatan, masyarakat Kecamatan Jagakarsa, dan akademisi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk memfokuskan pada informasi penting, penyajian data dalam bentuk naratif dan visual, serta penarikan kesimpulan yang diuji validitasnya untuk memastikan keakuratan temuan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kampanye Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

a. Kampanye Humas

Agenda Kampanye yang dilakukan oleh Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dalam kampanye pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa berjalan melalui pola komunikasi strategis yang memperhatikan dinamika isu di masyarakat. Agenda *setting* dilaksanakan dengan menyesuaikan isu-isu yang berkembang yang diperoleh dari pengaduan warga, laporan di media sosial, dan interaksi langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat. Proses ini sesuai dengan konsep agenda *setting* sebagaimana dijelaskan oleh Dearing & Rogers dalam (Safitri, et al., 2021) bahwa “media dan komunikasi publik berperan dalam membentuk perhatian dan persepsi masyarakat terhadap isu tertentu.” Penyampaian informasi yang dilakukan secara tatap muka dan melalui media sosial menunjukkan adanya

upaya membangun komunikasi yang efektif dan aksesibel. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Dirgantoro & Muksin, 2024) yang menegaskan pentingnya kreativitas dan kesinambungan komunikasi dalam penerapan agenda setting agar lebih dekat dengan masyarakat. Kebutuhan akan sosialisasi yang berulang dan komunikasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga keterlibatan masyarakat, sebagaimana dijelaskan juga oleh penelitian (Gunawan, 2022) yang menyoroti peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi yang mampu membangun hubungan baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penerapan agenda *setting* oleh Humas Sudin LH Jakarta Selatan tidak hanya sebatas penyusunan pesan kampanye, tetapi juga merupakan bagian dari strategi komunikasi publik yang terencana dan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Hal ini membuktikan bahwa penerapan agenda setting yang efektif dapat menjadi kunci dalam membangun partisipasi masyarakat, sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu.

1) Agenda Media

Penerapan agenda media dalam kampanye pengelolaan sampah oleh Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menunjukkan adanya pemanfaatan saluran komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tatap muka digunakan sebagai sarana sosialisasi langsung saat kegiatan rutin, sementara media sosial dipilih untuk menjangkau masyarakat lebih luas, dengan fleksibilitas akses tanpa batasan waktu. Hal ini sejalan dengan teori agenda *setting* yang menempatkan media sebagai penghubung utama antara isu dan perhatian publik (Dearing & Rogers dalam Safitri et al., 2021).

Temuan ini juga menguatkan hasil penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh (Dirgantoro & Muksin, 2024) bahwa efektivitas agenda setting bergantung pada kemampuan media mengelola dan menyampaikan isu yang relevan dengan masyarakat, didukung oleh kreativitas komunikasi. Selain itu, penelitian (Gunawan, 2022) menegaskan bahwa peran humas pemerintah dalam memanfaatkan media, baik sebagai teknisi komunikasi maupun fasilitator hubungan dengan masyarakat, sangat penting dalam mendorong keterlibatan publik. Dengan demikian, media baik konvensional seperti tatap muka maupun digital seperti media social memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan kampanye pengelolaan sampah, memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta berperan dalam membangun partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan kebutuhan lingkungan sosialnya.

2) Agenda Publik

Penerapan agenda publik dalam kampanye pengelolaan sampah oleh Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menempatkan persepsi masyarakat sebagai landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Persepsi publik dipahami melalui mekanisme pengaduan masyarakat dan komunikasi rutin dengan kelompok-kelompok lingkungan binaan. Hal ini sejalan dengan teori agenda *setting* oleh Dearing & Rogers (dalam Safitri et al., 2021), yang menekankan isu yang diangkat media atau institusi agar selaras dengan perhatian publik agar menjadi efektif dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat.

Selain itu, hasil ini juga didukung oleh penelitian (Surantio & Nurhasanah, 2022) yang menyebutkan bahwa media dan humas memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan menjadi bagian dari proses pembentukan keputusan sosial. Indikator keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari minimnya keluhan warga, tetapi juga dari keterlibatan aktif dan adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sehingga, Humas Sudin LH mampu menilai efektivitas kampanye yang dilakukan melalui evaluasi kegiatan di lapangan, monitoring perilaku masyarakat, serta partisipasi warga dalam program. Dengan begitu, agenda publik yang dibangun bukan hanya menjadi informasi satu arah, tetapi berkembang menjadi sebuah interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang berdampak pada peningkatan partisipasi dan kepedulian terhadap isu pengelolaan sampah.

3) Agenda Kebijakan

Penerapan agenda kebijakan dalam kampanye pengelolaan sampah oleh Humas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebutuhan masyarakat, kegiatan sosial, dan penyusunan kebijakan kampanye. Kebijakan tidak dibuat secara sepihak, melainkan disesuaikan dengan momen atau aktivitas yang sedang berlangsung di masyarakat agar lebih relevan dan mudah diterima. Temuan ini sejalan dengan teori agenda *setting* dari Dearing & Rogers, yang menempatkan agenda kebijakan sebagai tahap lanjutan dari perhatian media dan publik sebelum akhirnya diakomodasi dalam kebijakan formal (Safitri et al., 2021)

Kebijakan yang diimplementasikan di tingkat kecamatan juga melibatkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti BPS RW, Bank Sampah, Proklim, dan Adiwiyata, yang menjadi bagian dari strategi kolaboratif antara pemerintah dan warga. Hal ini menguatkan hasil penelitian (Gunawan, 2022) yang menyatakan bahwa peran humas pemerintah dalam membangun partisipasi masyarakat dapat mendorong keberhasilan program kebijakan yang berbasis kebutuhan lokal.

Selain itu, kolaborasi ini tercermin dalam forum-forum resmi seperti musrenbang dan agenda mingguan kecamatan yang menjadi media interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kampanye bukan hanya ditetapkan sebagai program dari atas ke bawah, tetapi merupakan hasil sinergi antara kebutuhan publik, kegiatan masyarakat, dan evaluasi lapangan sebuah prinsip yang sejalan dengan pandangan Cohen & Uphoff bahwa partisipasi masyarakat harus masuk ke seluruh tahapan pembangunan, termasuk dalam perumusan kebijakan (Gufran, et al. 2022).

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program lingkungan di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Dalam perspektif teori partisipasi menurut Cohen & Uphoff, keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan, tetapi juga seharusnya mencakup seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi.

1) *Participation in decision making*

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kampanye pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa masih bersifat terbatas. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan program karena perencanaan menjadi ranah otoritas internal Suku Dinas Lingkungan Hidup. Temuan ini sejalan dengan teori Cohen & Uphoff (dalam Gufran et al., 2022) bahwa partisipasi masyarakat idealnya bukan hanya dalam bentuk keikutsertaan pasif, tetapi harus menjadi keterlibatan aktif dan bermakna di setiap tahapan pembangunan, termasuk perencanaan.

Keterlibatan masyarakat lebih banyak terjadi dalam tataran implementasi, seperti pelaksanaan pemilahan sampah di rumah tangga, kegiatan gotong royong, serta menjadi nasabah bank sampah. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan adanya partisipasi operasional, bukan partisipasi strategis dalam pengambilan keputusan. Temuan ini juga relevan dengan hasil penelitian (Gunawan, 2022) yang menyoroti peran humas pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat, bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra dialog.

Berdasarkan teori Dearing & Rogers, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi penting agar kebijakan terasa lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, diperlukan model komunikasi dua arah dan dialogis antara pemerintah dan masyarakat agar partisipasi tidak sebatas penerimaan program, tetapi juga berperan dalam proses perumusannya. Hal ini sejalan dengan teori agenda *setting* Dearing & Rogers, yang menempatkan partisipasi publik sebagai salah satu faktor penting dalam penentuan isu-isu yang akan diangkat dalam kebijakan. Dengan demikian, meskipun masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka memiliki peran penting dalam pelaksanaan program. Ke depan, perlu diupayakan pendekatan partisipatif yang lebih terbuka

agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.

2) *Participation in implementation*

Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi program kampanye pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa menunjukkan respons yang cukup positif. Masyarakat cenderung terlibat aktif setelah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Keterlibatan ini terlihat dalam berbagai aktivitas yang dilakukan di lingkungan mereka, seperti kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pembuangan sampah secara teratur, kerja bakti, serta keikutsertaan sebagai nasabah bank sampah. Namun demikian, partisipasi masyarakat di tahap implementasi ini bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh adanya pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan. Ketika intensitas komunikasi dan penguatan program dari pihak pemerintah menurun, partisipasi masyarakat pun cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak terbentuk secara otomatis, melainkan membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan agar tetap aktif dan konsisten.

Bentuk-bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam pelaksanaan program meliputi gotong royong, kerja bakti di lingkungan, pemilahan sampah sejak dari sumber, serta keikutsertaan dalam bank sampah sebagai nasabah. Partisipasi tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, yang memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Keterlibatan ini didukung pula oleh adanya komunikasi dua arah antara warga dan pihak Suku Dinas LH, baik melalui kegiatan musyawarah maupun kegiatan lapangan yang terprogram. Pandangan masyarakat menegaskan bahwa kebersamaan dan kekompakan warga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan akademisi yang menilai bahwa selain pemberian informasi, penting bagi pemerintah untuk menghadirkan kegiatan nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik dari sisi metode, alat pendukung, maupun hasil yang terlihat.

Temuan ini memperkuat konsep partisipasi masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Cohen & Uphoff (dalam Gufran et al., 2022) bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas keikutsertaan dalam kegiatan, tetapi merupakan bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi di tahap implementasi menjadi salah satu wujud nyata keterlibatan tersebut, namun memerlukan penguatan yang terus-menerus dari pihak pelaksana program agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam implementasi kampanye pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa menunjukkan hasil yang baik, tetapi keberlanjutan dan konsistensinya sangat bergantung pada intensitas komunikasi, pendampingan, dan kehadiran nyata dari program-program pemerintah di tingkat komunitas.

3) *Participation in benefits*

Berdasarkan hasil penelitian, kampanye pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan memberikan berbagai manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat, baik dari aspek lingkungan maupun aspek ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat program ini tidak hanya terlihat dari peningkatan kesadaran, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan di lingkungan tempat tinggal. Manfaat lingkungan yang paling nyata adalah terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Hal ini juga berkontribusi pada berkurangnya keluhan masyarakat terhadap permasalahan kebersihan di wilayah mereka. Kampanye yang dijalankan terbukti mampu memunculkan dampak positif yang langsung dirasakan oleh warga, terutama di lingkungan yang aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Selain aspek lingkungan, manfaat ekonomi juga menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat sebagai nasabah bank sampah. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan edukasi, tetapi juga peluang untuk

memperoleh tambahan penghasilan dari hasil pengumpulan dan pengelolaan sampah. Keterlibatan warga dalam program bank sampah memberi nilai tambah berupa keuntungan ekonomi, yang memperkuat motivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Namun demikian, persebaran manfaat ini belum sepenuhnya merata di seluruh masyarakat. Beberapa warga merasakan manfaat yang besar, sementara sebagian lainnya belum mendapatkan dampak yang signifikan, terutama di wilayah yang tingkat partisipasinya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas jangkauan dan pemerataan program kampanye agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam merasakan manfaat program ini juga berkaitan erat dengan tingkat penerimaan mereka terhadap kampanye yang dilakukan. Minimnya keluhan dan adanya penerimaan positif dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan kampanye dalam membangun kesadaran dan menciptakan perubahan perilaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Cohen & Uphoff (dalam Gufran et al., 2022) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi keikutsertaan dalam menikmati manfaat hasil pembangunan, yang turut mendorong keberlanjutan program.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya peran humas pemerintah dalam membangun hubungan dengan masyarakat agar partisipasi publik meningkat, seperti diungkapkan oleh (Gunawan, 2022), bahwa kehadiran humas berperan dalam menciptakan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat kampanye pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa menunjukkan dampak yang cukup signifikan di berbagai aspek. Meski masih perlu pemerataan, penerimaan positif masyarakat menjadi modal penting dalam penguatan program berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan warga dan peningkatan kualitas lingkungan.

4) *Participation in evaluation*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kampanye pengelolaan sampah di Kecamatan Jagakarsa berjalan melalui mekanisme formal dan informal. Salah satu bentuk utama partisipasi evaluatif masyarakat adalah melalui sistem CRM, yang menjadi kanal resmi bagi warga untuk menyampaikan pengaduan, masukan, atau laporan terkait permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Sistem ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan keluhan atas penanganan sampah yang kurang optimal, pelanggaran pengelolaan sampah, maupun masalah lingkungan yang timbul. Hal ini sejalan dengan peran masyarakat dalam evaluasi program yang menurut Cohen & Uphoff (dalam Gufran et al., 2022) merupakan salah satu bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Evaluasi yang dilakukan masyarakat bukan hanya sekadar kritik, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial yang konstruktif.

Pihak Sudin Lingkungan Hidup sendiri mengakui bahwa masukan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi internal yang penting. Kritik, pengaduan, dan saran yang masuk melalui CRM atau pertemuan warga dianggap sebagai *feedback* yang harus ditindaklanjuti secara cepat dan profesional. Mekanisme ini menjadi wujud nyata dari keterlibatan masyarakat dalam mengawal keberhasilan program, memastikan agar kampanye tidak hanya berhenti di tataran sosialisasi, tetapi juga memberi ruang perbaikan yang berkelanjutan. Selain melalui jalur formal, partisipasi evaluasi juga terlihat dari diskusi masyarakat dalam forum lingkungan seperti musyawarah kampung, kegiatan rutin di RW, dan gotong royong. Hal ini menjadi bentuk kontrol sosial masyarakat yang mendorong evaluasi berbasis komunitas. Namun, di sisi lain, warga juga menyoroti adanya beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program, seperti kurangnya fasilitas pendukung dan ketidakberlanjutan kegiatan.

Temuan ini selaras dengan pandangan akademisi yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kebijakan, termasuk evaluasi. Seperti ditunjukkan oleh

penelitian (Satispi et al., 2019) kehadiran pemerintah dalam mendengar dan menindaklanjuti masukan masyarakat menjadi bagian dari aktivitas humas pemerintah yang strategis dalam membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam evaluasi kampanye pengelolaan sampah merupakan komponen penting dalam mendukung perbaikan dan pengembangan program. Meski sudah ada kanal pengaduan resmi, tantangan berupa kesinambungan evaluasi dan tindak lanjut masih menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Partisipasi evaluatif ini menjadi kunci dalam menciptakan program kampanye yang adaptif, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Hambatan Kampanye Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan Kampanye Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Jagakarsa menunjukkan adanya kesenjangan pada tiga tahap agenda setting. Pada tahap agenda media, keterbatasan dalam penyebaran informasi dan media komunikasi yang belum optimal membuat pesan kampanye tidak sepenuhnya tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Pada tahap agenda publik, rendahnya kesadaran dan kebiasaan pengelolaan sampah menyebabkan isu ini belum menjadi prioritas bagi sebagian warga. Sedangkan pada tahap agenda kebijakan, kurangnya dukungan fasilitas dan integrasi program dari berbagai pihak membuat upaya kampanye tidak berkesinambungan.

Hal ini sejalan dengan teori Agenda *Setting* (Dearing & Rogers dalam Safitri et al., 2021) yang menyatakan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, dan selanjutnya memengaruhi agenda kebijakan. Ketidakefektifan pada salah satu tahap dapat menghambat tahapan berikutnya. Selain itu, jika ditinjau dari teori Partisipasi Masyarakat (Cohen & Uphoff dalam Gufran et al., 2022), hambatan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan warga belum mencapai bentuk yang aktif dan bermakna di semua tahapan, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Partisipasi cenderung terbatas pada keikutsertaan fisik sesekali, tanpa diiringi pemahaman mendalam atau komitmen jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih terarah, penyediaan sarana pendukung, dan peningkatan peran serta warga secara berkesinambungan agar kampanye pengelolaan sampah dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Solusi yang dapat diterapkan dalam Kampanye Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jagakarsa

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dalam pelaksanaan kampanye pengelolaan sampah oleh Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan telah dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, baik setelah setiap kegiatan berlangsung maupun secara periodik dalam bentuk evaluasi semesteran dan tahunan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan, mengukur efektivitas program, serta mengevaluasi kecukupan sarana dan prasarana yang mendukung program. Evaluasi internal tersebut menjadi bagian dari siklus manajerial organisasi, sesuai dengan fungsi pengelolaan program komunikasi pemerintah. Namun, dari hasil wawancara, muncul catatan penting dari masyarakat bahwa hasil evaluasi sebaiknya tidak hanya menjadi konsumsi internal, melainkan perlu dibuka ruang partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk diskusi terbuka maupun umpan balik langsung. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari subjek perubahan, bukan hanya objek kampanye.

Pandangan akademisi juga menegaskan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan dan terbuka, agar kampanye tidak bersifat seremonial semata, melainkan mampu memberi dampak nyata dan terukur di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dari Cohen & Uphoff (dalam Gufran et al., 2022), yang menekankan bahwa masyarakat seharusnya terlibat tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam proses evaluasi sebagai wujud kontrol sosial dan akuntabilitas program. Dengan demikian, walaupun evaluasi sudah berjalan sebagai bagian dari sistem kerja Humas Sudin LH, keterlibatan masyarakat secara lebih intens dalam proses evaluasi baik melalui forum warga, pengaduan terbuka, maupun *feedback* komunitas untuk meningkatkan efektivitas program. Evaluasi yang partisipatif dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi bahan perbaikan berkelanjutan atas kebijakan dan kegiatan kampanye

yang dilakukan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kampanye Humas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan di Kecamatan Jagakarsa telah selaras dengan teori Agenda Setting Dearing & Rogers melalui pemanfaatan agenda media, publik, dan kebijakan, dengan mengombinasikan sosialisasi tatap muka untuk membangun kedekatan emosional dan media sosial untuk jangkauan luas. Isu yang diangkat berbasis kebutuhan lapangan dan diintegrasikan ke kebijakan lingkungan, menghasilkan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan meski keterlibatan pada tahap perencanaan dan evaluasi masih terbatas.
2. Hambatan kampanye mencakup keterbatasan literasi digital, minimnya variasi saluran komunikasi, rendahnya partisipasi aspirasi publik, serta keterbatasan anggaran, SDM, dan koordinasi lintas instansi. Tantangan utama partisipasi masyarakat meliputi rendahnya keterlibatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan yang belum merata, distribusi manfaat yang belum menyeluruh, serta evaluasi yang belum konsisten dan responsif.
3. Solusi yang diusulkan mencakup pembentukan forum evaluasi rutin di tingkat kelurahan/RT- RW yang melibatkan Humas Sudin LH, tokoh masyarakat, komunitas bank sampah, dan perwakilan warga, dengan fungsi mengidentifikasi masalah, menilai efektivitas kampanye, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Evaluasi dilakukan dengan indikator terukur seperti jumlah rumah tangga yang memilah sampah, volume sampah terpilah yang masuk ke bank sampah, dan tingkat kehadiran warga, lalu hasilnya diintegrasikan ke agenda kebijakan untuk perbaikan cepat sekaligus menjaga kepercayaan dan motivasi partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar Humas Sudin Lingkungan Hidup tidak hanya fokus pada penyusunan pesan dan pelaksanaan kampanye, tetapi juga lebih intensif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan.
2. Diharapkan masyarakat lebih aktif dan konsisten dalam berpartisipasi, baik dalam kegiatan pengelolaan sampah di lingkungannya maupun dalam memberikan masukan melalui jalur komunikasi yang disediakan, seperti CRM.
3. Disarankan penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang efektivitas berbagai media komunikasi dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, serta melakukan analisis komparatif antar wilayah atau kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirgantoro, G., & Muksin, N. N. (2024). Peran Agenda Setting Dalam Mendongkrak Pengunjung Antaranews (Studi Etnografi Berita Edukasi Kualitas Udara Jakarta). *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 5(1), 27-38. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/21103>
- Gufran, Ghany, N. F., Wahyuli, S., & Irfadat, T. (2022). *Dinamika Administrasi Pembangunan*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Gunawan, D. C. (2022). Peran Humas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Sampah Non-Organik Di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*.
- Juniartini, N. L. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 27-40. doi:10.51172/jbmb.v1i1.106

- Liliweri, A. (2018). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Prenada Media.
- Safitri, R., Alfira, N., Tamitiadini, D., Dewi, W. W., & Febriani, N. (2021). *Analisis Sentimen*. Malang: Brawijaya Press.
- Saktisyahputra, Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., . . . Muslim, F. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Satispi, E., Harmonis, & Urip. (2019). Aktivitas Humas Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Program Di Dinas Kebakaran Jakarta Selatan. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 3(2), 71-77. doi:<https://doi.org/10.24853/pk.3.2.71-77>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D Revisi 2020*. Bandung: Alfabeta.
- Surantio, H., & Nurhasanah. (2022). Agenda Setting dan Peranan Pers. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6680–6686. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9372>